

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR  
UTAMA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN,  
TINGKAT PENGANGGURAN, DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN MADIUN  
DAN SEKITARNYA TAHUN 2003-2012**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Surya Ayomi**

**105020101111022**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2014**

**LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL**

Artikel Jurnal dengan judul :

**ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR  
UTAMA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN,  
TINGKAT PENGANGGURAN, DAN INDEKS  
PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)  
DI SATUAN WILAYAH PEMBANGUNAN MADIUN  
DAN SEKITARNYA TAHUN 2003-2012**

Yang disusun oleh :

Nama : Surya Ayomi  
NIM : 105020101111022  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Februari 2014.

Malang, 1 Maret 2014

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sasongko, SE., MS.**

NIP. 19530406 198003 1 004

# **Analisis Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Satuan Wilayah Madiun dan Sekitarnya Tahun 2003-2012**

*Surya Ayomi*

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: [suryaayomi07@gmail.com](mailto:suryaayomi07@gmail.com)

## **ABSTRAK**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi sektor utama terhadap beberapa indikator makroekonomi menjadi beberapa tujuan yaitu mengetahui hubungan antara sektor ekonomi utama dengan jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, dan IPM di wilayah SWP Kota Madiun dan sekitarnya. Alat analisis yang digunakan adalah regresi data panel yang mencakup 6 kota/kabupaten di SWP madiun selama kurun waktu sepuluh tahun. Hasil penelitian ini diperoleh temuan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya adalah pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka adalah pertumbuhan sector pertanian. Hasil estimasi pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan perdagangan, hotel, dan restoran terhadap IPM menunjukkan variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran dan variabel pertumbuhan sector pertanian berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di SWP Madiun dan sekitarnya.*

*Kata Kunci: Sektor utama, Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan IPM*

---

## **A. PENDAHULUAN**

Era pemerintahan presiden Susilo Bambang Yodhoyono menegaskan kepeduliannya untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang kemudian dirumuskan melalui kesepakatan baru (*new deal*) dalam rangka pembangunan ekonomi di Indonesia. Ringkasan dari kesepakatan tersebut tertuang dalam prinsip *triple track strategy* yaitu *pro-growth*, *pro-job*, dan *pro-poor*. *Track* pertama dilakukan dengan cara meningkatkan pertumbuhan dan memperbanyak investasi dan ekspor. *Track* kedua menggerakkan sector untuk dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. *Track* ketiga adalah revitalisasi sector pertanian dan ekonomi pedesaan untuk mengurangi angka kemiskinan. Hal yang sama juga dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Timur dimana pada awal tahun 2013, Gubernur Jawa Timur, Soekarwo menyampaikan lima indikator capaian yang terangkum dalam Indikator Kerja Utama (IKU) yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), disparitas wilayah, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Baik *Triple track strategy* dan indikator kkerja utama Provinsi Jawa Timur yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengarah pada pembangunan ekonomi yang harus memperhatikan kualitas dalam pencapaiannya.

Proses pembangunan ekonomi daerah yang memperhatikan aspek potensi sumber daya tentunya memperhatikan aspek kualitas dalam pencapaiannya. Berdasarkan teori pertumbuhan Neoklasik sebagaimana yang dijelaskan oleh Sukirno (2002) menjelaskan bahwa sumbangan paling penting dari teori pertumbuhan Neoklasik bukanlah dalam menunjukkan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun teori tersebut digunakan untuk mengadakan penyelidikan empiris untuk menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mantap. Sebuah pencapaian pertumbuhan yang mantap adalah apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang juga mampu menekan jumlah pengangguran. Selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang mantap juga mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi dengan kesenjangan antar daerah yang disebabkan oleh pertumbuhan di beberapa daerah besar akan menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Arsyad (2006) mengelompokkan indikator pembangunan menjadi indikator moneter dan indikator nonmoneter. Indikator moneter terdiri atas pendapatan per kapita dan indikator

kesejahteraan ekonomi bersih (*net economic welfare*). Sedangkan indikator nonmoneter terdiri atas indikator sosial, indeks pembangunan manusia (IPM), dan indikator campuran. Dalam hal ini indikator campuran meliputi aspek-aspek yaitu, pendidikan, kesehatan, pengangguran, tingkat konsumsi per kapita dan, akses kebutuhan dasar. Berhubungan dengan hal tersebut, indikator makroekonomi seperti kesempatan kerja, tingkat kemiskinan, dan indeks pembangunan manusia akan menentukan kualitas dari pembangunan ekonomi dan menguji seberapa besar keberpihakan pembangunan tersebut dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Di negara berkembang seperti Indonesia, peranan sumberdaya manusia mengambil tempat yang sentral, khususnya dalam pembangunan ekonomi, dimana kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat. Berpedoman pada hal ini masalah penduduk termasuk di dalamnya kemiskinan dan tenaga kerja, baik secara kualitatif dan kuantitatif, wajib diberi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembangunan manusia yang ditunjukkan oleh IPM memandang pembangunan yang menjamin keberlanjutan hidup manusia dan berkeadilan sosial merupakan kewajiban negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak atas pembangunan bagi seluruh rakyat. Oleh karena itu, program pembangunan harus diarahkan untuk pemerataan dan pengurangan kemiskinan melalui komitmen visi pembangunan nasional, dan diimplementasikan melalui konsep pembangunan yang berpihak kepada masyarakat.

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah, proses lajunya pertumbuhan perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan tingkat penambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut Sukirno dalam Prishardayo (2008) tingkat penambahan PDRB tersebut seringkali dijadikan sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam sembilan sektor ekonomi.

Wilayah SWP Madiun yang merupakan bagian Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan merupakan daerah yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat. Berdasarkan laporan RKPD Kabupaten Ponorogo tahun 2011, pertumbuhan ekonomi SWP Madiun dari sisi permintaan yang ditunjukkan berbagai indikator konsumsi dan investasi menunjukkan terjadinya peningkatan. Sementara itu dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi SWP Madiun akan tetap ditopang oleh kinerja sektor-sektor utama. Kinerja sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), dan pertanian sebagai sektor utama di wilayah SWP Madiun.

Secara geografis dan tatanan ekonomi, Provinsi Jawa Timur dikelompokkan dalam 4 koridor yaitu koridor Utara-Selatan, koridor Barat-Daya, koridor Timur, dan koridor Utara. SWP Madiun dan sekitarnya termasuk dalam koridor Utara dan koridor Barat Daya. SWP Madiun ini tergolong dalam kelompok kabupaten/kota dengan tipologi *resource base* yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang cukup baik terutama pada wilayah barat yang dominan pada aspek pertanian. Di samping itu wilayah Madiun dan Ngawi termasuk dalam tipologi wilayah kota sedang dimana wilayah ini mempunyai ciri tingkat pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang cenderung semi-kota. Aviliani (2010) menjabarkan bahwa setidaknya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas dibutuhkan dua indikator utama dalam pencapaiannya. Hal pertama adalah isu ketenagakerjaan yang menyangkut masalah pengangguran. Sebuah pencapaian pertumbuhan yang mantap adalah apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang juga mampu menekan jumlah pengangguran.

Berdasarkan uraian di atas menjadi penting untuk mengetahui seberapa besar dampak keberadaan sektor-sektor ekonomi unggulan di wilayah SWP Kota Madiun dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, penyerapan tenaga kerja, dan indeks pembangunan manusia (IPM). Sehingga berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa sektor-sektor ekonomi yang utama dalam sebuah wilayah diharapkan mampu memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi wilayah yang tergabung dalam SWP Kota Madiun. Dengan demikian diharapkan pertumbuhan sektor utama tidak hanya bergerak pada menciptakan nilai namun juga mampu secara nyata memperbaiki atau bahkan meningkatkan kualitas kesejahteraan dari masyarakat.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### **Teori Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut, juga ditentukan oleh seberapa besar terjadi *transfer-payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah, atau mendapatkan dana dari luar wilayah. Menurut Sukirno (2008), pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Aliran klasik berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi disebabkan faktor kemajuan teknologi dan perkembangan jumlah penduduk. Kemajuan jumlah teknologi tergantung pada pembentukan modal. Dengan adanya akumulasi modal akan memungkinkan dilaksanakannya spesialisasi atau pembagian kerja sehingga mengakibatkan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Sebagai dampak dari aktivitas ini, maka akan terdorongnya penambahan investasi (pembentukan modal) dan persediaan modal (*capital stock*), yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan kemajuan teknologi dan menambah pendapatan. Bertambahnya pendapatan berarti meningkatnya kemakmuran penduduk. Peningkatan kemakmuran mendorong bertambahnya jumlah penduduk. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka secara langsung akan memberlakukan hukum pertumbuhan hasil yang semakin berkurang (*law of diminishing return*), yang selanjutnya akan enurukan akumulasi modal.

Model Solow-Swan menggunakan unsur pertumbuhan penduduk, akumulasi capital, kemajuan teknologi, dan besarnya output yang saling berinteraksi. Solow-Swan menggunakan model fungsi produksi yang memungkinkan adanya substitusi antara capital (K) dan tenaga kerja (L). Dengan demikian syarat-syarat adanya pertumbuhan yang mantap dalam model Solow-Swan kurang restriktif disebabkan kemungkinan substitusi antara modal dan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya fleksibilitas dalam rasio-modal output dan rasio-modal tenaga kerja.

### **Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas**

Pertumbuhan ekonomi dalam sebuah negara, seperti halnya penambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, penambahan jumlah sekolah, penambahan produksi sektor jasa dan penambahan produksi barang modal. Tetapi dengan menggunakan berbagai jenis data produksi adalah sangat sukar untuk memberi gambaran tentang pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Oleh sebab itu, untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, ukuran yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai (Sukirno, 2006).

Sementara pertumbuhan ekonomi berkualitas menurut Gunawan (2012) berarti pertumbuhan ekonomi yang bisa mendistribusikan pembangunan dan melakukan distribusi pendapatan secara merata untuk rakyat melalui pengembangan dan pemerataan ekonomi dengan kebijakan prorakyat. Hal ini, akan memperkuat ekonomi domestik dan investasi fokus pada sektor riil yang dapat dinikmati dan berkaitan langsung dengan rakyat. Sektor riil-lah yang mampu menyediakan lapangan kerja dan berdampak langsung pada peningkatan konsumsi, kesejahteraan rakyat, dan mempercepat produktivitas agar kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalkan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mampu dicapai dengan mempertimbangkan beberapa indikator penting. Aviliani (2010) menjabarkan bahwa setidaknya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap dan berkualitas dibutuhkan dua indikator utama dalam pencapaiannya. Hal pertama adalah isu ketenagakerjaan yang menyangkut masalah pengangguran. Sebuah pencapaian pertumbuhan yang mantap adalah apabila peningkatan pertumbuhan ekonomi rata-rata yang juga mampu menekan jumlah pengangguran. Indikator kedua yang yang mempengaruhi kualitas pertumbuhan ekonomi adalah kesenjangan antar daerah. Terpusatnya pertumbuhan di beberapa daerah besar akan kesenjangan dan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Aviliani (2010) mengklasifikasikan kualitasnya pertumbuhan ekonomi Indonesia setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, struktur perekonomian yang harus kuat. Dominasinya sektor konsumsi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) akan membuat struktur perekonomian Indonesia justru semakin rapuh. Kedua, meningkatnya sektor padat kerja (*tradable*)

terhadap PDB. Lebih lanjut dijelaskan bahwa penurunan kontribusi sektor *tradeable* di Indonesia dapat diamati melalui beberapa hal yaitu (i) pertumbuhan yang semakin menurun, (ii) kredit perbankan yang semakin menurun, (iii) ketimpangan distribusi penanaman modal, dan (iv) masalah infrastruktur.

### **Ketenagakerjaan**

Secara teoritis terdapat hubungan yang erat antara pembangunan ekonomi dan ketenagakerjaan. Hubungan tersebut dijelaskan oleh teori dua sektor Arthur Lewis yang menjelaskan bahwa perhatian pada mekanisme yang memungkinkan negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsisten tradisional ke pola perekonomian yang lebih modern yang berorientasi pada kehidupan perkotaan (Todaro, 2006). Teori ini cocok mengingat sampai saat ini tenaga kerja Indonesia bekerja pada sektor subsisten yang kemudian tergerus oleh sektor industri. Model pertumbuhan Lewis terkenal dengan nama “ Model Pertumbuhan Dengan Supply Tenaga Kerja Takterbatas ”. Pokok permasalahan yang dikaji oleh Lewis adalah bagaimana proses pertumbuhan terjadi dalam perekonomian dengan dua sektor yaitu: 1) Sektor tradisional dengan produktivitas rendah dan sumbangan tenaga kerja melimpah. 2) Sektor modern dengan produktivitas tinggi dan sebagai sektor akumulasi kapital.

Perhatian utama dalam model Lewis diarahkan pada terjadinya proses pengalihan tenaga kerja serta pertumbuhan output dan peningkatan penyerapan tenaga kerja disektor modern. Pengalihan dan peningkatan penyerapan tenaga kerja tersebut dimungkinkan oleh adanya perluasan output pada sektor modern tersebut. Adapun laju atau kecepatan terjadinya perluasan tersebut ditentukan oleh investasi dibidang industri dan akumulasi modal secara keseluruhan disektor modern. Peningkatan utama investasi itu sendiri dimungkinkan oleh adanya kelebihan keuntungan sektor modern dari selisih upah, dengan asumsi bahwa para kapitalis yang berkecimpung disektor modern tersebut bersedia menanamkan kembali keuntungannya. Kemudian tingkat upah disektor industri perkotaan diasumsikan konstan dan berdasarkan premis tertentu, jumlahnya ditetapkan melebihi tingkat rata-rata upah disektor pertanian subsisten tradisional. Dengan kondisi seperti itu maka diasumsikan produktivitas akan terus meningkat, karena ada penambahan investasi yang berasal dari keuntungan para kapitalis. Itulah yang menurut Lewis disebut sebagai pertumbuhan.

### **Tingkat Pengangguran**

Sukirno (2002) mendefinisikan pengangguran sebagai suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan yang belum dapat diperolehnya. Seseorang yang tidak dapat bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai penganggur. Faktor utama yang menimbulkan pengangguran adalah kekurangan agregat. Para pengusaha memproduksi barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan tersebut hanya dapat diperoleh apabila para pengusaha dapat menjual barang dan jasa yang mereka produksi. Semakin besar permintaan, maka akan semakin besar barang dan jasa yang mereka wujudkan. Kenaikan produksi yang dilakukan akan menambah penggunaan tenaga kerja. Dengan demikian terdapat hubungan yang erat di antara tingkat pendapatan nasional yang dicapai dengan penggunaan tenaga kerja yang dilakukan, maka semakin tinggi pendapatan nasional, semakin banyak penggunaan tenaga kerja dalam perekonomian.

Pada umumnya pengeluaran agregat yang terwujud dalam perekonomian adalah lebih rendah dari pengeluaran agregat yang diperlukan untuk mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh. Kekurangan permintaan agregat adalah faktor penting yang menimbulkan pengangguran. Namun disamping hal tersebut terdapat faktor-faktor lain yang menimbulkan pengangguran adalah (i) menganggur karena ingin mencari kerja yang lebih baik, (ii) pengusaha menggunakan peralatan industri modern yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, dan (iii) ketidaksesuaian di antara keterampilan pekerja yang sebenarnya dengan keterampilan yang diperlukan dalam industri-industri.

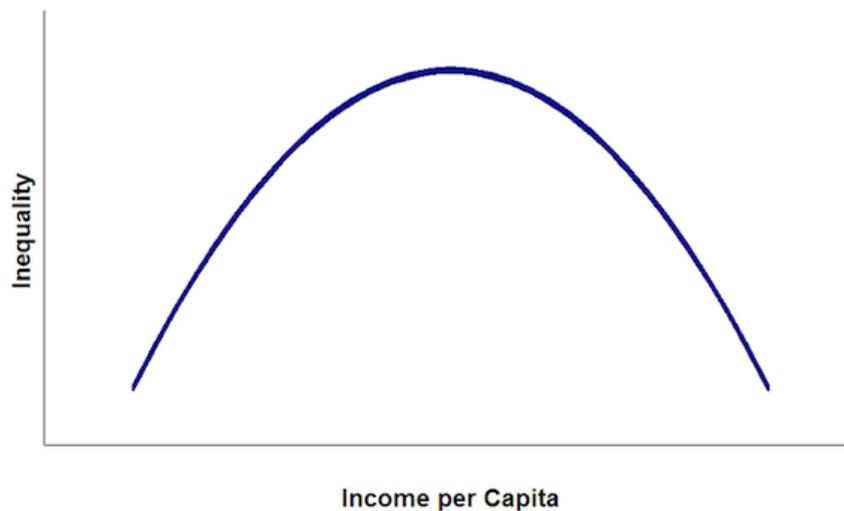
Hubungan teoritis antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran lebih lanjut dijelaskan oleh hukum Okun (*Okun's Law*). Dimana dalam teori ini dijelaskan bahwa peran tenaga kerja yang membantu dalam proses produksi barang dan jasa dan para penganggur tidak, maka peningkatan dalam tingkat pengangguran seharusnya dikaitkan dengan penurunan dalam GDP. Hubungan negative antara pengangguran dan GDP inilah yang dinamakan sebagai hukum Okun

(Mankiw, 2000). Hukum Okun menyatakan bahwa “ Setiap 2% penurunan *Gross Domestic Product* (GDP) potensial, angka penganggur akan naik sebesar 1%”. Jika terdapat peningkatan dalam produksi output nasional, dimana dalam hal ini konsep yang dipakai adalah PDB, akan menaikkan permintaan tenaga kerja sehingga penganggur turun, maka akan terjadi hubungan yang negatif antara GDP dan penganggur.

### **Kemiskinan**

Arsyad (2006) mengamati kemiskinan sebagai kondisi dimana anggota masyarakat yang tidak atau belum ikut serta dalam proses perubahan karena tidak mempunyai kemampuan, baik kemampuan dalam pemilihan faktor produksi maupun kualitas faktor produksi yang memadai sehingga tidak mendapatkan manfaat dari hasil proses pembangunan. Simon Kuznets (dalam Todaro, 2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk (ketimpangan membesar), namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai kurva Kuznets “U-terbalik” (Hipotesis Kuznets).

Gambar 1: **Kurva Kurnetz**



Sumber: Todaro (2006)

Dalam hal ini, pembuktian hipotesis Kuznets dilakukan dengan membuat grafik antara pertumbuhan PDRB dengan indeks ketimpangan (Indeks Williamson). Jika kurva yang dibentuk oleh hubungan antara variabel tersebut menunjukkan kurva U-terbalik, maka hipotesis Kuznets terbukti bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi terjadi ketimpangan yang membesar dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu ketimpangan akan menaik dan demikian seterusnya.

### **Indeks Pembangunan Manusia**

IPM mengukur pencapaian keseluruhan dari suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup, pengetahuan dan suatu standar hidup yang layak. Ketiganya diukur dengan angka harapan hidup, pencapaian pendidikan, dan pengeluaran per kapita (Hakim, 2004). Jika IPM hanya dilihat dari pengeluaran per kapita saja, berarti hanya melihat kemajuan status ekonomi suatu daerah/negara berdasarkan pendapatan per tahun sedangkan apabila melihat pada sisi sosial (pendidikan dan kesehatan), maka akan dapat dilihat dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat (Yunitasari dalam Hidayat, 2008). Sehingga dengan demikian secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain semakin tinggi/baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik.

### C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) Madiun dan sekitarnya yang merupakan gabungan dari Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Pacitan dengan kurun waktu sepuluh tahun yaitu tahun 2003-2012. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari data PDRB menurut harga konstan 2000, data tenaga kerja, data kemiskinan, serta data IPM untuk masing-masing kota/kabupaten. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sector-sector unggulan di wilayah SWP Madiun dan sekitarnya, yaitu sector Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan sector Pertanian pada tahun 2003-2012. Sedangkan variabel dependen Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM menurut wilayah SWP Madiun dan sekitarnya pada tahun 2003-2012. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teknik analisis yaitu regresi data panel dengan pendekatan *fixed effect* dan *random effect* yang menggunakan program *EViews 6.0*. Sehingga model fungsi yang digunakan adalah

$$Y1 = f(X1, X2) \quad (1)$$

$$Y2 = f(X2, X2) \quad (2)$$

$$Y3 = f(X2, X3) \quad (3)$$

$$Y1it = \beta_0 + \beta_1 X1it + \beta_2 X2it + Uit \quad (4)$$

$$Y1it = \beta_0 + \beta_1 X1it + \beta_2 X2it + Uit \quad (5)$$

$$Y3it = \beta_0 + \beta_1 X1it + \beta_2 X2it + Uit \quad (6)$$

Dimana, Tingkat Kemiskinan (%) (Y1), Tingkat pengangguran terbuka (%) (Y2), Indeks Pembangunan Manusia (Y3), Pertumbuhan Sektor Pertanian (%) (X1), PertumbuhanPerdagangan, Hotel, Restoran (X3) , Error (U), Unit *cross section* (I), Unit *time series*(t), konstanta ( $\beta_0$ ), koefisien ( $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ ).

### D. PEMBAHASAN

#### Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan pada hasil regresi pengaruh pertumbuhan sector utama (X1 dan X2) terhadap tingkat kemiskinan (Y1) menunjukkan bahwa pertumbuhan sector pertanian yang ditunjukkan oleh variabel X1 tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, dimana diketahui berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai t untuk variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,08 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Oleh karena variabel pertumbuhan sector ekonomi (X1) nilai signifikannya lebih besar dari tingkat signifikansi ( $0,08 > 0,05$ ) sehingga menerima H0 dan menolak H1. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien pertumbuhan sector pertanian (X1) bertanda negative sebesar 0,621 menunjukkan jika pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 0,62%.

Tabel 1: Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Kemiskinan

Dependent Variable: Y1?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/18/14 Time: 20:39				
Sample: 2003 2012				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficien t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	25.79639	1.422021	18.14065	0.0000
X1?	-0.621601	0.350994	-1.770975	0.0824
X2?	-0.988027	0.170618	-5.790864	0.0000

Fixed Effects (Cross)			
_PACITAN--C	7.412952		
_PONOROGO--C	1.611130		
_MADIUN--C	0.291363		
_MAGETAN--C	-2.546355		
_NGAWI--C	4.743951		
_MADIUNKOTA--C	-11.51304		
	Effects Specification		
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.786059	Mean dependent var	17.04800
Adjusted R-squared	0.757260	S.D. dependent var	6.901974
S.E. of regression	3.400511	Akaike info criterion	5.409295
Sum squared resid	601.3008	Schwarz criterion	5.688540
Log likelihood	-154.2788	Hannan-Quinn criter.	5.518523
F-statistic	27.29402	Durbin-Watson stat	1.160030
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Pengolahan *EViews 6.0*

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa pertumbuhan pertanian di SWP Madiun dan sekitarnya tidak diikuti dengan percepatan penurunan yang signifikan pada jumlah penduduk miskin. Data pertumbuhan pertanian terus mengalami peningkatan meskipun terjadi fluktuasi di beberapa kabupaten. Kenaikan pertumbuhan pertanian ini diimbangi secara berlawanan oleh jumlah penduduk miskin yang menunjukkan angka yang terus menurun dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Secara teoritis hubungan yang negative antara pertumbuhan dan kemiskinan dapat terpenuhi, namun sesuai dengan hasil penelitian ini yang menyebutkan bahwa pertumbuhan sector pertanian tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan.

Penyebab dari tidak signifikannya hubungan antara pertumbuhan pertanian dengan kemiskinan adalah penyebab kemiskinan di kabupaten kota yang tergabung dalam SWP Madiun ini berasal dari ketidakmampuan penduduk SWP Madiun dalam memenuhi kebutuhan dasar. Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar standar atas setiap aspek kehidupan. Sen dalam Siregar dan Wahyuniarti (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan lebih terkait dengan ketidakmampuan untuk mencapai standar hidup tersebut dari pada apakah standar hidup tersebut tercapai atau tidak.

Penelitian ini menunjukkan bahwa di wilayah SWP Madiun, pertumbuhan pertanian saja tidak akan mampu menggerakkan angka kemiskinan menjadi berkurang secara signifikan. Secara absolut, seseorang dinyatakan miskin apabila tingkat pendapatan secara absolut berada di bawah tingkat subsisten atau cukup. Karena kemiskinan dikaitkan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, maka apabila seseorang berada dalam kondisi miskin, maka segala kebutuhan dasar tidak akan terpenuhi, yang mencakup kebutuhan makan, kesempatan mendapat pendidikan dan layanan kesehatan. Sehingga untuk mengukur hal tersebut dapat dilihat melalui indeks *purchasing power parity* atau daya beli masyarakat.

Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran signifikan terhadap tingkat kemiskinan di SWP Madiun dan sekitarnya. Dengan menggunakan uji t, maka diketahui variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran (X2) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tingkat kemiskinan. Koefisien pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat kemiskinan. Koefisien variabel X2 bertanda negatif sebesar 0,980 menunjukkan apabila pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat kemiskinan sebanyak 0,98%. Secara keseluruhan kedua variabel independen X1 dan X2 berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Kuznet yang menyebutkan bahwa pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, hal ini disebabkan karena

pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan, jumlah penduduk miskin akan berangsur-angsur berkurang. Selanjutnya menurut Siregar (2008) mengungkapkan pentingnya percepatan pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan, karena dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menurunkan tingkat kemiskinan yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan daerah.

Menurut Todaro (2000) pada proses awal, pembangunan akan terkonsentrasi hanya pada wilayah yang modern seperti wilayah perkotaan. Beberapa wilayah di SWP Madiun pada awalnya sudah mempunyai kinerja investasi yang baik, misalnya Kota Madiun, maka dengan sendirinya kinerja lainnya juga akan meningkat, termasuk ketersediaan infrastruktur yang seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan. Dengan adanya dukungan infrastruktur yang baik, seperti fasilitas jalan, sarana komunikasi, dan keuangan, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari peningkatan output yang bermuara pada meningkatnya permintaan kerja yang berdampak pada pengurangan angka penduduk miskin (Marhaeni dalam Prastyadewi, 2011). Sehingga dengan demikian, tersedianya infrastruktur akan mempengaruhi jumlah penyerapan tenaga kerja, produksi barang dan jasa sector perdagangan, yang berujung pada pengentasan kemiskinan suatu wilayah. Kualitas dari infrastruktur juga menjadi hal penting karena mempengaruhi perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah, perbedaan itulah yang menjadi awal dari munculnya perbedaan penyerapan kerja pada masing-masing wilayah yang tergabung dalam SWP Madiun dan sekitarnya.

#### **Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka**

Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan sector pertanian yang ditunjukkan oleh variabel X1 tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, dimana diketahui berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai t untuk variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,56 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Oleh karena variabel pertumbuhan sector ekonomi (X1) nilai signifikannya lebih besar dari tingkat signifikansi ( $0,56 > 0,05$ ) sehingga menerima H0 dan menolak H1. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka. Koefisien pertumbuhan sector pertanian (X1) bertanda negative sebesar 0,1197 menunjukkan jika pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,11%.

Tabel 2: Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Dependent Variable: Y2?				
Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 01/18/14 Time: 20:47				
Sample: 2003 2012				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 60				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	9.615613	1.474866	6.519651	0.0000
X1?	-0.119749	0.206387	-0.580216	0.5641
X2?	-0.447988	0.100706	-4.448463	0.0000
Random Effects (Cross)				
_PACITAN--C	-3.085379			
_PONOROGO--C	-1.222533			
_MADIUN--C	1.254141			
_MAGETAN--C	-2.398896			
_NGAWI--C	0.209738			
_MADIUNKOTA--C	5.242930			
Effects Specification				
			S.D.	Rho
Cross-section random			2.972536	0.6861
Idiosyncratic random			2.010608	0.3139
Weighted Statistics				
R-squared	0.790126	Mean dependent var		1.285171
Adjusted R-squared	0.765218	S.D. dependent var		2.354942
S.E. of regression	2.018643	Sum squared resid		232.2704
F-statistic	11.64796	Durbin-Watson stat		0.828231
Prob(F-statistic)	0.000057			
Unweighted Statistics				
R-squared	0.173391	Mean dependent var		6.144333
Sum squared resid	711.9985	Durbin-Watson stat		0.270188

Sumber: Pengolahan Data *Eviews 6.0*

Tidak terdapatnya hubungan yang signifikan antara pertumbuhan pertanian dan pengangguran yang berada di SWP Madiun dan sekitarnya disebabkan karena tingkat pengangguran tidak akan berkurang apabila mengandalkan pertumbuhan sector pertanian. Pertanian merupakan sector yang padat karya yang juga berarti sector ini mampu menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan sector pertanian menunjukkan nilai yang terus meningkat meskipun terdapat beberapa nilai yang berfluktuasi. Begitu pula dengan penyerapan kerja di sector pertanian yang mengalami kenaikan sepanjang 2010 hingga 2012. Berdasarkan data keadaan angkatan kerja di Jawa Timur yang diterbitkan BPS, tercatat penyerapana tenaga kerja di sector pertanian mengalami kenaikan, namun kenaikan tersebut sangat lambat dan jauh tertinggal dibanding dengan sector padat modal lain.

Fenomena tersebut disebabkan karena komponen pengangguran terbuka yang didominasi oleh para pencari kerja tidak lagi tertarik untuk masuk di sector pertanian. Banyak sebab yang melatarbelakangi minimnya minat kerja di sector ini diantaranya karena pertanian di wilayah ini masih menggunakan teknologi tradisional sehingga memperlambat laju pertumbuhan outputnya. Menurut Sukirno (2002) negara berkembang dimana setengah dari penduduknya berada di sector pertanian justru berpotensi terdapat masalah pengangguran tersembunyi. Cara bercocok tanam yang masih tradisional, penggunaan input pertanian yang masih sederhana, kurangnya infrastruktur pertanian menyebabkan produktivitas sector tersebut masih rendah dan masalah kemiskinan yang meluas.

Di samping hal tersebut, menurut BPS dalam publikasi keadaan tenaga kerja Jawa Timur menyebutkan bahwa pekerja di pertanian didominasi oleh pekerja dengan usia 40 hingga 60 tahun ke atas dengan sebagian besar status pekerjaan sebagai pekerja bebas dan pekerja keluarga yang tidak dibayar. Sehingga walaupun mereka bekerja mereka akan tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar dengan pendapatan mereka yang relatif kecil. Dengan demikian maka sudah jelaslah bahwa pengangguran tidak cukup ditentukan oleh pertumbuhan output pertanian, namun lebih kepada kinerja sector ini untuk dapat berjalan lebih cepat sehingga memberi kesempatan kerja yang luas.

Peningkatan yang terus-menerus dari penyerapan tenaga kerja sector pertanian di SWP Madiun dan sekitarnya ternyata tidak serta merta meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas. Penumpukan tenaga kerja yang terserap di sector pertanian tidak akan tertampung sepenuhnya di sector tersebut. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas tenaga kerja yang berdampak pada penurunan pendapatan yang berimplikasi peningkatan angka pengangguran dan perlambatan angka pertumbuhan pertanian. Hal ini sejalan dengan adanya kecenderungan pergeseran structural dimana kelebihan tenaga kerja di sector pertanian akan beralih ke sector modern yang ternyata masih belum dapat menyerap tenaga kerja tersebut. Sehingga kondisi ini justru akan menimbulkan dampak pengangguran tidak kentara, urbanisasi, dan meningkatnya jumlah pekerja di sector informal.

Fenomena ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur perekonomian dimana menurut teori Lewis dalam Todaro (2000) menyebutkan bahwa dalam perekonomian yang terbelakang ada dua sector yaitu sector pertanian dan sector modern. Sector pertanian adalah sector tradisional dengan marjinal produktivitas tenaga kerjanya nol. Dengan kata lain, apabila tenaga kerjanya dikurangi tidak akan mengurangi output dari sector pertanian. Sector modern adalah sector modern dan output dari sector ini akan bertambah bila tenaga kerja dari sector pertanian berpindah ke sector modern ini. Dalam hal ini terjadi pengalihan tenaga kerja, peningkatan output dan perluasan kesempatan kerja. Masuknya tenaga kerja ke sector modern akan meningkatkan produktivitas dan meningkatkan output.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas mengenai kecenderungan adanya pergeseran sektoral dari pertanian ke sector modern, hal di atas berkaitan dengan hasil regresi variabel pertumbuhan sector perdagangan (X2). Hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya. Dengan menggunakan uji t, maka diketahui variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran (X2) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel tingkat pengangguran terbuka. Koefisien pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap terhadap tingkat pengangguran. Koefisien variabel X2 bertanda negatif sebesar 0,447 menunjukkan apabila pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran meningkat sebesar 1% maka akan menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebanyak 0,44%. Secara keseluruhan kedua variabel independen X1 dan X2 berpengaruh negative terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Dalam kerangka makroekonomi, Hukum Okun menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan GDP. Senada dengan Hukum Okun, teori Neoklasik menyebutkan bahwa peningkatan PDRB yang merupakan indikator dari pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Solow dan Swan mengklasifikasikan tingkat pertumbuhan berasal dari tiga sumber yaitu: akumulasi modal, bertambahnya penawaran tenaga kerja, dan peningkatan teknologi. Teknologi ini terlihat dari peningkatan *skill* atau kemajuan teknik sehingga produktivitas per kapita meningkat.

### Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hasil regresi pengaruh pertumbuhan sektor utama yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan terhadap IPM menunjukkan bahwa pertumbuhan sector pertanian yang ditunjukkan oleh variabel X1 signifikan terhadap IPM di SWP Madiun dan sekitarnya. Pengujian ini dilakukan dengan uji t, dimana diketahui berdasarkan persamaan regresi diperoleh nilai t untuk variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) nilai probabilitasnya adalah sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Oleh karena variabel pertumbuhan sector ekonomi (X1) nilai signifikannya lebih besar dari tingkat signifikansi ( $0,000 < 0,05$ ) sehingga menolak H0 dan menerima H1. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan sector pertanian (X1) berpengaruh signifikan terhadap IPM. Koefisien pertumbuhan sector pertanian (X1) bertanda positif sebesar 0,607 menunjukkan jika pertumbuhan sector pertanian meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebanyak 0,60%.

Tabel 3: Hasil Regresi Pengaruh Pertumbuhan Sektor Utama terhadap IPM

Dependent Variable: Y3?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 01/18/14 Time: 20:50				
Sample: 2003 2012				
Included observations: 10				
Cross-sections included: 6				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	64.63198	0.685613	94.26896	0.0000
X1?	0.607513	0.169228	3.589910	0.0007
X2?	0.501229	0.082262	6.093100	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_PACITAN--C	-1.115631			
_PONOROGO--C	-1.963849			
_MADIUN--C	-0.941629			
_MAGETAN--C	1.795532			
_NGAWI--C	-3.851133			
_MADIUNKOTA--C	6.076710			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.813092	Mean dependent var	69.96300	
Adjusted R-squared	0.787931	S.D. dependent var	3.560231	
S.E. of regression	1.639521	Akaike info criterion	3.950251	
Sum squared resid	139.7775	Schwarz criterion	4.229497	
Log likelihood	-110.5075	Hannan-Quinn criter.	4.059479	
F-statistic	32.31587	Durbin-Watson stat	1.203421	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Pengolahan Data *Eview* 6.0

Hasil regresi juga menunjukkan bahwa pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran signifikan terhadap IPM di SWP Madiun dan sekitarnya. Dengan menggunakan uji t, maka diketahui variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran (X2) mempunyai nilai probabilitas sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa variabel X2 mempunyai hubungan yang signifikan dengan variabel IPM. Koefisien pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran (X2) berpengaruh signifikan terhadap

terhadap IPM. Koefisien variabel X2 bertanda positif sebesar 0,5012 menunjukkan apabila pertumbuhan sector perdagangan hotel restoran meningkat sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebanyak 0,50%. Secara keseluruhan kedua variabel independen X1 dan X2 berpengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Hal ini sesuai dengan teori dan penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam penelitian ini.

Hasil ini didukung oleh penelitian Yunitasari (2007) yang menggunakan variabel pembangunan manusia untuk menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Hasil dari penelitian yang dilakukannya adalah variabel pertumbuhan ekonomi yang menggunakan indikator PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan dengan pembangunan manusia di Jawa Timur dengan nilai koefisien regresi dari variabel PDRB sebesar 0,008 persen. Hubungan positif dan pengaruh yang nyata variabel pertumbuhan ekonomi dengan IPM diyakini sebagai implikasi dari harus sejalan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan social. Dengan demikian maka pertumbuhan ekonomi dapat memberikan sumbangan secara langsung terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan social, begitu pula sebaliknya pembangunan social dapat menyumbang langsung terhadap pembangunan perekonomian (Yunitasari, 2007).

IPM dilihat dari dimensi yang jauh lebih beragam terkait dengan kualitas hidup masyarakat (Yunitasari dalam Hidayat, 2008). Sehingga dengan demikian secara tidak langsung, IPM selalu berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain semakin tinggi atau baik setiap komponen yang menyusun IPM juga berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Komponen pembentuk IPM seperti yang dibahas pada kajian teori merupakan komponen yang terdiri atas indeks harapan hidup, indeks daya beli, dan indeks pendidikan. Menurut Yunitasari (2007) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat dapat dijelaskan melalui dua jalur, jalur pertama melalui kebijakan dan pengeluaran pemerintah dimana prioritasnya adalah pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran mengindikasikan komitmen pemerintah terhadap pembangunan manusia. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Magetan (2012) jumlah masyarakat miskin di Kabupaten Magetan tahun 2012 sebanyak 232.139 jiwa dan yang telah mendapat jaminan kesehatan melalui Jamkesmas sebanyak 123.727 jiwa serta yang mendapat jaminan kesehatan melalui Jamkesda sebanyak 108.412 jiwa.

IPM mempunyai peran sentral dalam pembangunan ekonomi. Sesuai dengan komponen pembentuknya yaitu daya beli, kesehatan, dan pendidikan. Komponen pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dalam mengembangkan kapasitas. Kesehatan merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas, sementara keberhasilan dari pendidikan juga bertumpu pada kesehatan yang baik. Oleh karena itu Todaro (2006) menjelaskan bahwa kesehatan dan pendidikan dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai input dari factor produksi.

Jalur kedua untuk melihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat adalah melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini, faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti pemenuhan nutrisi anggota keluarganya, biaya pelayanan pendidikan dan kesehatan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa. Kesejahteraan penduduk semakin meningkat ditunjukkan dengan pendapatan penduduk yang meningkat juga. Selama kurun waktu 2009 hingga 2012 persentase pengeluaran non makanan Kabupaten Madiun menunjukkan angka yang lebih tinggi dari pada pengeluaran untuk makanan. Berdasarkan hasil survei SUSENAS 2009-2011, perkembangan kesejahteraan penduduk Kabupaten Madiun diukur melalui tingkat pendapatan, selama periode 2009-2011 tingkat kesejahteraan penduduk mengalami peningkatan seperti yang ditunjukkan oleh semakin meningkatnya tingkat pendapatan perkapita maupun pengeluaran perkapita. pendapatan per kapita penduduk meningkat dari Rp720.020 pada tahun 2009 menjadi Rp905.900 pada tahun 2011 atau selama tiga tahun terakhir pendapatan per kapita penduduk kabupaten madiun meningkat sebesar 25.81 persen.

Berdasarkan data BPS 2013, pada tahun 2012 sebesar 34,22 persen penduduk mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo memiliki pengeluaran perkapita sebulan pada rentang 200.000 - 299.999 rupiah. persentase ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 37,88 persen. Namun pada rentang pengeluaran yang lebih tinggi yaitu 300 ribu ke atas mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini mengindikasikan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat. Dilihat dari jenis pengeluaran yang dikonsumsi, pada tahun 2012 pengeluaran makanan hampir seimbang dengan pengeluaran non makanan meski masih lebih

besar pengeluaran untuk makanan yaitu 51,31 persen untuk pengeluaran makanan dan sisanya sebesar 48,69 persen merupakan pengeluaran non makanan. bergesernya proporsi konsumsi untuk makanan kepada konsumsi non makanan menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut ukuran untuk melihat kualitas pembangunan masyarakat adalah melihat dari keadaan konsumsi, kesehatan, dan pendidikan. BPS (2013) menyebutkan bahwa terjadi peningkatan penduduk berusia 15 tahun ke atas berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah lulusan setidaknya yang telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Begitu pula halnya dengan penduduk yang menempuh pendidikan tinggi seperti diploma dan pendidikan universitas juga meningkat di SWP Madiun dan sekitarnya. Hal ini membuktikan bahwa naiknya pertumbuhan sektoral akan menginisiasi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, ini merupakan dampak dari kesejahteraan yang semakin meningkat.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengaruh pertumbuhan sector utama terhadap tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran dan IPM di SWP Madiun dan sekitarnya tahun 2003-2012. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan pada pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya adalah pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan variabel yang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka adalah pertumbuhan sector pertanian. Hasil estimasi pengaruh pertumbuhan sector pertanian dan perdagangan, hotel, dan restoran terhadap IPM menunjukkan variabel pertumbuhan sector perdagangan hotel dan restoran dan variabel pertumbuhan sector pertanian berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di SWP Madiun dan sekitarnya.
2. Hasil estimasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan berlawanan antara pertumbuhan sector utama dan tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka di SWP Madiun dan sekitarnya. Atau dengan kata lain apabila terdapat kenaikan satu satuan unit pada variabel pertumbuhan sector utama maka secara rata-rata akan menurunkan satu satuan unit dari variabel tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Hasil estimasi pengaruh pertumbuhan sector utama menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang searah atau positif antara pertumbuhan sector utama dengan IPM di SWP Madiun dan sekitarnya. Dengan kata lain peningkatan satu satuan unit pada variabel pertumbuhan sector utama secara rata-rata akan meningkatkan satu satuan variabel IPM dengan menganggap variabel lain adalah konstan.

### **Saran**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, maka beberapa implikasi terhadap kebijakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi pada sector pertanian tidak mampu menekan jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran. Sehingga dengan demikian dalam upaya penanggulangan pengangguran dan kemiskinan di daerah adalah adanya rangsangan ekonomi berupa terjangkaunya harga sarana produksi, harga jual, serta penggunaan teknologi dan saeran panganan pasca panen. Selain bertumpu pada rangsangan ekonomi adanya perbaikan saluran tersier dan peningkatan subsidi input pertanian oleh pemerintah sehingga dapat secara efektif menjangkau kebutuhan khususnya pertanian. Strategi pengentasan kemiskinan di pedesaan harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur pertanian di pedesaan. Adanya pembinaan usaha tani padat modal yang digalang oleh suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara diharapkan dapat memperbaiki sistem kelembagaan sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Pertumbuhan yang pro kemiskinan merupakan cara untuk dapat menghasilkan output yang signifikan antara pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan melalui

penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak. Pertumbuhan yang pro kemiskinan sudah seharusnya menggunakan pendekatan yang berfokus kepada keyakinan bahwa orang-orang miskin harus mendapat keuntungan dari pertumbuhan ekonomi.

2. Pertumbuhan ekonomi justru merupakan sarana utama bagi pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja. Hubungan yang tidak otomatis ini sesungguhnya merupakan tantangan bagi pelaksanaan pemerintah untuk merancang kebijakan yang mantap sehingga hubungan keduanya bersifat saling memperkuat.
3. Sektor utama sangat perlu mendapat dorongan, dikembangkan, dan disinergikan dengan sektor utama lainnya yang terkait. Hal ini berhubungan dengan sebuah sektor dikatakan bersinergi apabila pertumbuhan salah satu sektor utama akan mendorong sektor lain untuk tumbuh. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan teori Horrod-Domar menyebutkan bahwa dalam meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi wilayah harus adanya usaha untuk mendorong kinerja sektor utama secara bersama-sama, karena apabila semua sektor berkembang secara seimbang, kenaikan produksi suatu sektor akan mampu diserap oleh sektor lainnya. Dengan adanya langkah ini maka akan mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Risma. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bogor: Program Sarjana Institut Pertanian Bogor.
- Aviliani. 2010. Mencapai Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas. *Jurnal Sekretariat Negara RI* No. 17. Hal. 141-150.
- Arifin, Bustanul. 2007. Diagnosis Ekonomi Politik Pangan dan Pertanian. Grafindo Persada: Jakarta.
- Arsyad, Lincoln. 2006. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPF
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Kota Madiun Dalam Angka 2013*. Madiun: BPS  
.2013. *Pacitan Dalam Angka 2013*. Pacitan: BPS  
.2013. *Ponorogo Dalam Angka 2013*. Ponorogo: BPS  
.2013. *Madiun Dalam Angka 2013*. Madiun: BPS  
.2013. *Magetan Dalam Angka 2013*. Magetan: BPS  
.2013. *Ngawi Dalam Angka 2013*. Ngawi: BPS
- Badan Pusat Statistik. *Analisis Indikator Makro Jawa Timur 2007*. Surabaya: BPS, 2008  
. *Analisis Indikator Makro Jawa Timur 2008*. Surabaya: BPS, 2009  
. *Analisis Indikator Makro Jawa Timur 2009*. Surabaya: BPS, 2010  
. *Analisis Indikator Makro Jawa Timur 2010*. Surabaya: BPS, 2011  
. *Analisis Indikator Makro Jawa Timur 2011*. Surabaya: BPS, 2012  
. *Analisis Indikator Makro Jawa Timur 2012*. Surabaya: BPS, 2013
- Dajan, A. 2001. Pengantar Metode Statistik, Jilid 1. Jakarta: LP3ES.
- Dewi, Purwanti. 2009. Analisis Sektor Unggulan dalam Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. Skripsi. Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Bogor.
- Djojohadikusumo, Sumitro, 1995, Perkembangan Pemikiran Ekonomi Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan, Jakarta: LP3ES.
- Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia, Jakarta: Erlangga

- Fudjaja, Letty. 2002. *Dinamika Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Dan Industry Di Sulawesi Selatan*. (Thesis). Ilmu Ekonomi Pertanian. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Gudjarati, Damodar. 2007. *Dasa-dasar Ekonometrika*. Zain Sumarno dan Zein [penerjemah]. Erlangga, Jakarta.
- Gunawan, Joseph Henricus. 2012. *Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas*. Dimuat dalam *SUARA KARYA*, 28 Juni 2012. <http://www.suarakarya-online.com/> diakses tanggal 11 Oktober 2013
- Hakim, Abdul., Setyawan, M Bhakti. 2013. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Jurnal Economia*, Volume 9, Nomor 1.
- Hidayat, Kurniawati Nia. 2008. Analisis Hubungan Komponen Indeks Pembangunan Manusia dengan Kemiskinan di Propinsi Jawa Barat. Skripsi. Bogor: Fakultas Pertanian IPB.
- Irawan., Suparmoko, M. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Edisi 6. Yogyakarta: BPFE
- Iswanto, Dyan. 2013. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran: Validitas Hukum Okun di Indonesia*. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Indra, Van. 2013. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2010. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- J Simanjuntak. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: LPFEUI
- Kairupan, Siesti. 2013. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, dan Belanja Daerah pengaruhnya terhadap Kesempatan Kerja di Sulawesi Utara tahun 2000-2012. *Jurnal EMBA*. Volume 1 Nomer 4. Hal 2206-2216.
- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad, 2002, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: YKPN.
- Mambea, Yudha *et al.* 2010. Analisis Tingkat Pengangguran di 25 Kabupaten Kota di Jawa Barat 2006-2009. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran.
- Melliana, Ayunanda. Zain Ismaini. 2013. Analisis Statistik Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits* Vol.2 No.2.
- Mankiw, 2000. *Teori Makroekonomi*. Edisi Empat. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurhadi, Eko. 2007. Analisis Kemiskinan di Daerah pedesaan dan perkotaan di Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Manajemen agribisnis* Volume 1 No.2
- Oloan, Indra. 2009. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keempatan Kerja Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatra Utara. Tesis. Universitas Sumatra Utara Medan.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. 2011. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Ponorogo.
- Prishardayo, Bambang. 2008. Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2000-2005. *JEJAK*, Volume 1, Nomor 1.

- Prastyadewi, Made. 2011. Analisis penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan Dampaknya terhadap PDRB Provinsi Bali. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Produk Domestik Regional Bruto Kota Madiun Tahun 2010. 2011. Madiun. Dicitak oleh CV Aneka Surya-Surabaya.
- Qomariyah, Isti. 2013. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi* Vol 1, No.3.
- Ramanathan, R. 1998. *Introductory Econometrics Fourth Edition. The Dryden Press. Forth Worth.*
- Rejekiingsih, Tri Wahyu. 2004. Mengukur Besarnya Peranan Industri Kecil dalam Perekonomian di Propinsi Jawa Tengah. *Dinamika Pembangunan*. Vol.1 No.2 Hal. 125-136.
- Richardson, Harry, W. 2001. Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional. Paul Sitohang [penerjemah]. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rusli, Said., 1995. Pengantar Ilmu Penduduk. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Sukirno, Adono. 2002. Pengantar Teori Makroekonomi. Edisi Kedua. Grafindo Persada. Jakarta.
- Setyawan, Agus., Indraastuti, Rina., Joesron, TS. 2012. *Analisis Pengaruh Sektor Pertanian dan Sektor Industri Pengolahan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah. Universitas Padjajaran.*
- Setyawan, Budi. 2008. Analisis Peran Sektor Ekonomi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur. Malang: Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Sitanggang, R. I & Nachrowi, D. N. (2004). Pengaruh Struktur Ekonomi Pada Penyerapan Tenaga Kerja Sektoral : Analisis Model Demometrik di 30 Propinsi pada 9 Sektor di Indonesia. *Jurnal Ekonommi dan Pembangunan Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 5, No. 1, pp 103- 133.
- Siregar, Hermanto. Wahyuniarti, 2006. Dampak Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. Institut Pertanian Bogor.
- Subekti, Mohamad A. 2007. Pengaruh Upah, Nilai Produksi, Nilai Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Genteng di Kabupaten Banjarnegara[skripsi]. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.
- Supardi. 2005. Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis. Yogyakarta: UII Press
- Siregar, Hermanto Dan Wahyuniarti, Dwi. 2011. Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan di Kota Salatiga. Brighten Institute.
- Tinjauan Ekonomi Dan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur Kemenkeu RI. 2012. Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
- Todaro, M.P dan Smith S.C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P., 2003, *Economic Development* , Eight Edition, Pearson Education Limited, Eidenburg Gate, Harlow, Essex, England.
- Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

- Wijaya, Bayu dan Atmanti Hastarini Dwi. 2006. *Analisis Pengembangan Wilayah dan Sektor Potensial Guna Mendorong Pembangunan di Kota Salatiga*. *Dinamika Pembangunan*. Vol.3 No.2: 101-118
- Wijayanto, R. Dwi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Yunitasari, Maria. 2007. Analisis Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Pembangunan Manusia Propinsi Jawa Timur. Skripsi. Bogor: Departemen Ilmu Sosial Ekonomi Pertanian IPB.
- Yuza, Adrian. 2012. Analisis Variabel IPM sebagai Indikator Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Malang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.